

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

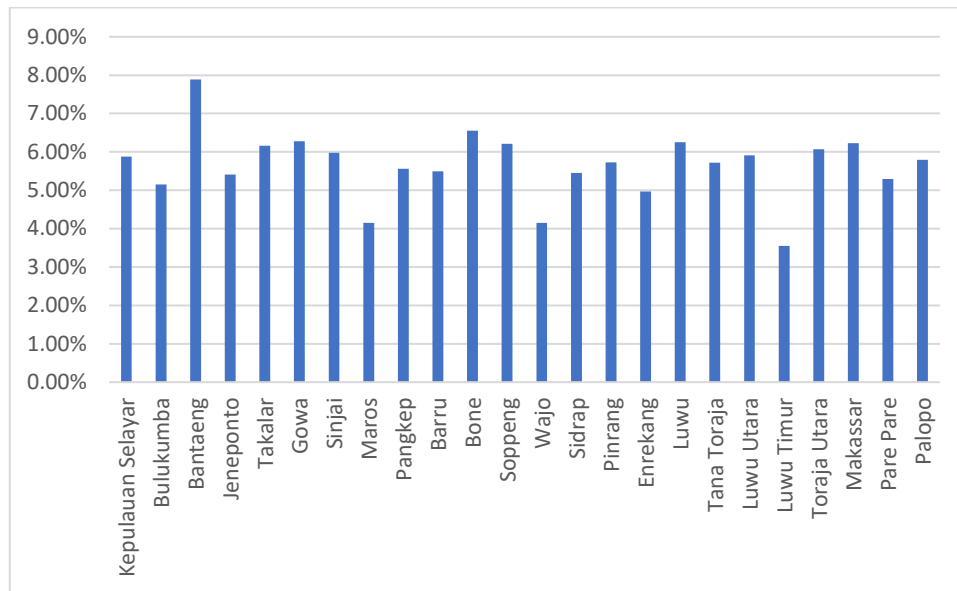
Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ukuran kuantitatif tersebut ditunjukkan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada tahun tertentu dibandingkan tahun sebelumnya (Sukirno, 2004). Dalam kegiatan ekonomi nyata, pertumbuhan ekonomi berarti peningkatan hasil produksi barang dan jasa yang terjadi di suatu negara. Peningkatan hasil tersebut meliputi bertambahnya produksi barang industri, pembangunan infrastruktur, bertambahnya jumlah sekolah, meningkatnya produksi di sektor jasa, serta bertambahnya produksi barang modal. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, sebab jika pertumbuhan ekonomi membaik, maka terjadi peningkatan produksi barang dan jasa, pembangunan infrastruktur, serta bertambahnya barang modal (Zulfa, 2008).

Pertumbuhan ekonomi secara umum biasanya diukur dari peningkatan Produksi Domestik Regional Bruto dari suatu daerah atau negara yang menjadikan objek penelitian. Cara lain adalah dengan melihat perbaikan pendapatan per kapita, dimana yang dilakukan secara makro adalah dengan cara mengusahakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat. Dari hasil Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) di berbagai sektor lapangan usaha, baik sektor basis atau unggulan maupun sektor non basis ataupun atas sektor

konsumsi, investasi, net perdagangan internasional dan pemerintah dengan memicu peningkatan output usaha namun juga sebaiknya disertai dengan penurunan tingkat pengangguran juga dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi yg sedang terjadi.

Salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Meskipun sering digunakan sebagai tolak ukur pembangunan, indikator ini masih bersifat umum dan belum sepenuhnya menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara individu. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah (Suryono, 2010).

Adapun laporan data PDRB Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan tahun disajikan pada gambar 1.1 berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan (data diolah)

Gambar 1. 1 Rata-Rata Laju PDRB atas Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2023

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 di setiap kabupaten/kota selama kurun waktu 2014–2023 menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama sepuluh tahun terakhir mencerminkan dinamika pembangunan yang berbeda di masing-masing daerah. Kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi selama periode tersebut adalah Bantaeng dengan pertumbuhan sebesar 7,89%, disusul oleh Bone (6,55%), Gowa (6,28%), Makassar (6,23%), dan Soppeng (6,21%). Kabupaten lain yang juga menunjukkan performa pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat adalah Takalar (6,16%), Luwu (6,25%), dan Toraja Utara (6,07%). Sementara itu, beberapa daerah mencatatkan rata-rata pertumbuhan yang relatif lebih rendah, seperti Luwu Timur (3,55%), Wajo (4,15%), dan Maros (4,15%). Perbedaan ini dapat

dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah, ketergantungan pada sektor tertentu, serta ketahanan daerah terhadap gangguan ekonomi seperti pandemi COVID-19.

Secara umum, sebagian besar kabupaten/kota di Sulawesi Selatan memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi di atas 5% per tahun selama periode sepuluh tahun tersebut. Hal ini mencerminkan adanya upaya pembangunan yang cukup konsisten, meskipun terdapat fluktuasi pada masa pandemi. Rata-rata pertumbuhan ini memberikan gambaran menyeluruh terhadap kinerja ekonomi masing-masing wilayah dalam jangka panjang, dan dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan daerah, terutama dalam kaitannya dengan alokasi belanja sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Dinamika ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah sangat rentan terhadap faktor eksternal dan krisis global. Oleh karena itu, peran belanja pemerintah daerah pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi sangat penting dalam menjaga daya tahan ekonomi serta mempercepat proses pemulihan dan pertumbuhan jangka panjang.

Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang signifikan dalam sektor ekonomi mencerminkan peningkatan tingkat pendapatan masyarakat di suatu daerah. Sementara itu, dalam aspek non-ekonomi, peningkatan tersebut juga menunjukkan adanya perbaikan dalam bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, lingkungan hidup, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Secara keseluruhan, PDRB

menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atau imbalan kepada faktor-faktor produksi yang berkontribusi dalam proses produksi di daerah tersebut.

United Nations Development Programme (UNDP) merumuskan suatu indikator yang dikenal sebagai Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator yang bersifat lebih menyeluruh dalam menilai tingkat keberhasilan pembangunan dan taraf kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah yang digunakan secara global. IPM terdiri dari tiga sektor utama dalam pembangunan manusia yang dinilai penting berdasarkan aspek fisik maupun nonfisik penduduk, yaitu kesehatan yang diukur melalui angka harapan hidup, pendidikan yang dilihat dari tingkat melek huruf dan rata-rata lama menempuh pendidikan, serta standar hidup yang layak berdasarkan tingkat daya beli masyarakat (Fahmi, 2015).

Berdasarkan data yang diunggah oleh BPS, data IPM kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2014 hingga 2023 menunjukkan adanya tren peningkatan yang konsisten, meskipun dengan laju pertumbuhan yang bervariasi antar wilayah. Kota Makassar secara konsisten mencatatkan IPM tertinggi, dari 78,45 menjadi 83,64, yang mencerminkan keberhasilan pembangunan manusia di wilayah perkotaan dengan infrastruktur dan layanan publik yang relatif lebih baik. Sementara itu, beberapa daerah seperti Jeneponto dan Kepulauan Selayar menunjukkan angka IPM yang relatif rendah, meskipun tetap mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun tahun 2020 menjadi titik kritis akibat pandemi COVID-19 yang menekan perekonomian, IPM di sebagian besar daerah tetap meningkat, menandakan adanya ketahanan pada

sektor pembangunan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial, tetap mampu memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, IPM menjembatani hubungan antara belanja pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi. Artinya, pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan tidak hanya bersifat langsung, tetapi juga terjadi melalui perbaikan kualitas manusia yang tercermin dari kenaikan IPM.

Tingkat capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di setiap negara maupun daerah sangat dipengaruhi oleh peran aktif pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan fiskal yang mencakup pengelolaan penerimaan dan belanja negara. Kebijakan fiskal merupakan serangkaian tindakan pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara, pemanfaatan sumber daya secara optimal, serta pengendalian harga barang dan jasa di pasar (Suparmoko, 1997:257).

Untuk mencapai tujuan negara, pemerintah daerah melaksanakan program dan kegiatan untuk melayani masyarakat di semua bidang pelayanan publik, seperti kesehatan, infrastruktur, pendidikan. Komitmen pemerintah dalam membangun kualitas atau kesejahteraan masyarakat dapat terlihat melalui alokasi pengeluaran pemerintah dari tiga jenis belanja yaitu belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja infrastruktur (Ritonga, 2014)

Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan mengalokasikan belanja pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Alokasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat aktivitas ekonomi daerah. Salah satu hasil dari kebijakan tersebut tampak pada peningkatan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), yang merepresentasikan kemajuan pembangunan dari aspek kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat. Peningkatan IPM diharapkan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang di tingkat daerah.

Sektor pendidikan merupakan salah satu elemen yang sangat esensial dalam mendukung kemajuan suatu negara. Banyak ahli berpendapat bahwa pendidikan memainkan peran kunci dalam menentukan kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan di bidang ekonomi, sosial, maupun kemasyarakatan (Kest, 2005). Pendidikan adalah sektor krusial untuk pembangunan jangka panjang suatu negara dan merupakan aspek utama untuk mencapai taraf hidup yang layak. Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk kemampuan negara berkembang untuk mengadopsi teknologi modern serta meningkatkan kapasitas guna mendorong pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006:20).

Sektor kesehatan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk pembangunan fasilitas kesehatan, pengadaan obat-obatan, dan penyediaan layanan medis yang dapat diakses oleh semua kalangan. Kesehatan yang optimal menjadi dasar bagi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, karena individu yang sehat lebih mampu bekerja dan berkontribusi dalam aktivitas ekonomi.

Infrastruktur yang memadai merupakan elemen penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Penyediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas tinggi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi yang optimal serta memastikan kesejahteraan masyarakat dapat dinikmati secara merata di semua kalangan. Infrastruktur yang baik mempermudah mobilitas barang dan orang, mengurangi ketimpangan antar wilayah, dan meningkatkan daya saing daerah (Windhu Putra, 2017).

Dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan daerah, pemerintah mengalokasikan belanja pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketiga sektor ini tidak hanya berperan penting dalam memperbaiki kondisi sosial-ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Pada sektor pendidikan, terjadi tren kenaikan yang signifikan dalam belanja pemerintah selama periode 2014–2023. Kota Makassar, sebagai pusat layanan pendidikan, mencatatkan belanja tertinggi pada 2023 dengan lebih dari Rp1,1 triliun, diikuti oleh kabupaten-kabupaten lain seperti Gowa, Bone, dan Luwu yang juga menunjukkan peningkatan belanja secara konsisten. Meskipun terdapat penurunan di beberapa daerah pada masa pandemi 2020, pemulihan belanja pendidikan kembali terjadi dalam dua tahun terakhir, menandakan komitmen pemerintah terhadap pengembangan sektor ini.

Di sektor kesehatan, pola serupa juga terlihat. Belanja kesehatan meningkat tajam terutama pada tahun 2020 sebagai respon terhadap pandemi COVID-19. Sebagian besar daerah meningkatkan alokasi anggaran secara signifikan untuk memperkuat sistem kesehatan dan layanan publik. Misalnya,

Kabupaten Bone mengalokasikan lebih dari Rp533 miliar pada 2020, dan Kota Makassar mencatat belanja lebih dari Rp671 miliar pada tahun yang sama. Hingga tahun 2023, alokasi belanja tetap tinggi, menunjukkan bahwa sektor kesehatan menjadi prioritas dalam proses pemulihan dan pembangunan pasca-pandemi.

Sementara itu, sektor infrastruktur juga menunjukkan pola fluktuatif namun tetap penting dalam mendukung aktivitas ekonomi. Beberapa daerah mencatat belanja infrastruktur yang tinggi menjelang 2019, seperti Kota Makassar dan Kabupaten Pinrang. Namun, pandemi 2020 menyebabkan penurunan alokasi di sebagian besar daerah. Meski demikian, tren pemulihan terlihat kembali pada tahun 2021–2023, di mana beberapa kabupaten/kota seperti Gowa, Luwu, dan Makassar mulai menaikkan kembali belanja untuk pembangunan fisik dan konektivitas wilayah.

Keterkaitan antara belanja pemerintah dan pembangunan manusia dapat ditinjau secara jelas. Alokasi dana pada sektor kesehatan bertujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup serta menurunkan tingkat kematian ibu dan bayi, yang merupakan indikator penting dalam pengukuran pembangunan manusia. Sementara itu, pembiayaan di sektor pendidikan diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, sehingga berkontribusi dalam meningkatkan angka harapan lama sekolah (Akbar, 2016). Belanja infrastruktur berpotensi mendorong peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat serta memperkuat daya beli mereka. Efektivitas kebijakan fiskal daerah, khususnya dalam bentuk pengeluaran pemerintah di tiga sektor utama—yakni kesehatan, pendidikan,

serta infrastruktur memegang peranan penting dalam mendorong kemajuan suatu wilayah. Kemajuan ini tidak hanya tercermin dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (Akbar, 2016).

Belanja pada sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia. Maka dari itu pengaruh dari belanja tersebut tidak bisa dirasakan secara langsung, melainkan memerlukan waktu untuk memberikan pengaruh yang nyata. Dengan demikian, pembangunan kualitas manusia tidak terlepas dari peran aktif pemerintah dalam mengelola dan menjaga keseimbangan ekonomi. Peran pemerintah sangat penting dalam mengatur berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas, terutama dalam penyediaan barang publik, sekaligus sebagai upaya untuk mendorong pemerataan ekonomi. Tantangan utama yang dihadapi adalah apakah belanja pada sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur tersebut efektif dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji pengaruh belanja pemerintah daerah sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, sebagian besar studi terdahulu masih menggunakan pendekatan regresi data panel, seperti Fixed Effect Model atau Random Effect Model. Pendekatan ini umumnya hanya menguji hubungan linier secara parsial dan belum sepenuhnya mampu menangkap keterkaitan struktural yang kompleks antara kebijakan fiskal, pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam banyak

penelitian sering diperlakukan sebagai variabel dependen akhir atau dianalisis secara terpisah, sehingga perannya sebagai variabel mediasi belum diuji secara komprehensif.

Padahal secara konseptual, pengaruh belanja pemerintah daerah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tidak selalu berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, melainkan dapat bekerja melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam IPM. Oleh karena itu, pengujian hubungan antar variabel tersebut memerlukan pendekatan metodologis yang mampu menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung secara simultan dalam satu kerangka model yang utuh.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan *Structural Equation Modeling* (SEM) untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah daerah sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2014–2023. Penggunaan SEM diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai mekanisme transmisi kebijakan fiskal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah belanja pemerintah daerah sektor pendidikan berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan?

2. Apakah belanja pemerintah daerah sektor kesehatan berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan?
3. Apakah belanja pemerintah daerah sektor infrastruktur berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka disajikan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui belanja pemerintah daerah sektor pendidikan berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui belanja pemerintah daerah sektor kesehatan berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah daerah sektor infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pembuat kebijakan, dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Kalangan akademisi, dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi dan kajian literatur untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro dan Smith (2006), pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian yang berlangsung secara berkelanjutan, sehingga menghasilkan peningkatan pendapatan dan output nasional dari waktu ke waktu. Terdapat tiga komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi yang berperan penting bagi masyarakat, yaitu: (1) akumulasi modal, yang mencakup seluruh investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik, serta pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan di sektor kesehatan, pendidikan, dan keterampilan kerja; (2) pertumbuhan jumlah penduduk yang berdampak pada peningkatan angkatan kerja; dan (3) kemajuan teknologi, yang secara luas mencakup inovasi dalam menyelesaikan pekerjaan dengan cara yang lebih efisien.

Teori pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kajian yang membahas faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan output per kapita dalam jangka panjang serta bagaimana faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap proses pertumbuhan ekonomi. (Boediono, 2000: 2)

Secara umum, pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah atau negara yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, alternatif lain dalam mengukurnya adalah dengan melihat peningkatan pendapatan per kapita, yang pada tingkat makro dapat diwujudkan melalui upaya peningkatan pendapatan masyarakat. PDRB

sendiri berasal dari berbagai sektor lapangan usaha, termasuk sektor basis dan non-basis, serta mencakup komponen konsumsi, investasi, perdagangan internasional, dan belanja pemerintah. Pertumbuhan output di sektor-sektor tersebut tidak hanya menjadi indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi juga idealnya disertai dengan penurunan tingkat pengangguran agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan ekonomi yang terjadi.

Teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Paul M. Romer pada tahun 1986 dan Robert Lucas pada tahun 1988, yang menyoroti peran penting modal manusia (*human capital*) dan kemajuan teknologi sebagai faktor utama yang memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.

Menurut Romer (1986), pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh peran modal manusia melalui peningkatan teknologi. Hal ini tercermin dalam fungsi output agregat berikut: $Y = f(A, K, L, H)$, di mana A merepresentasikan kemajuan teknologi, K menunjukkan modal fisik, L menggambarkan jumlah tenaga kerja, dan H mencakup kualitas sumber daya manusia yang diperoleh melalui pendidikan serta pelatihan.

Teori pertumbuhan ekonomi endogen menyajikan sudut pandang bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang tidak semata-mata bergantung pada akumulasi modal fisik, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh akumulasi modal manusia. Menurut Romer (1986), negara yang mampu menciptakan pengetahuan dan inovasi lebih cepat dibandingkan negara lain, memiliki potensi untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dengan demikian, pendekatan pertumbuhan endogen menempatkan pembangunan

kualitas sumber daya manusia sebagai faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. (Sasongko & Wibowo, 2022)

Peningkatan pengetahuan serta keterampilan diyakini dapat mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja. Teori ini menekankan bahwa investasi dalam modal fisik maupun modal manusia memainkan peran penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, teori ini juga mendorong keterlibatan aktif kebijakan publik dalam mendukung pembangunan ekonomi, baik melalui investasi langsung maupun tidak langsung terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia. Peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi juga tercermin melalui kemampuannya memengaruhi pola konsumsi, alokasi belanja publik, serta penerimaan negara dari sektor perpajakan (Munandar, 2017).

Teori pertumbuhan endogen berkembang melalui dua pendekatan utama. Pendekatan pertama menekankan pada proses *learning by doing*, di mana pembelajaran melalui pengalaman dan pengenalan inovasi baru dalam sistem ekonomi menjadi faktor pendorong peningkatan produktivitas. Sementara itu, pendekatan kedua menyoroti bahwa inovasi dan penemuan teknologi merupakan sumber utama pertumbuhan produktivitas ekonomi. Meskipun memiliki titik fokus yang berbeda, kedua pendekatan tersebut sepakat bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan elemen kunci dalam mendorong peningkatan produktivitas ekonomi (Priambodo, 1995).

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan suatu negara atau

wilayah, berdasarkan tiga dimensi utama, yakni: harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta daya beli masyarakat. Dimensi harapan hidup mencerminkan kondisi kesehatan, dimensi pendidikan diukur melalui tingkat melek huruf orang dewasa dan rata-rata lama menempuh pendidikan, sedangkan dimensi daya beli menunjukkan standar hidup masyarakat secara keseluruhan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan hasil pengolahan data berdasarkan tiga dimensi utama. Pertama, dimensi umur panjang (*longevity*) yang diukur melalui indikator harapan hidup saat lahir. Kedua, dimensi pengetahuan (*knowledge*), yang ditentukan oleh tingkat melek huruf orang dewasa serta angka partisipasi gabungan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi—dengan masing-masing indikator memiliki bobot yang setara. Ketiga, dimensi standar hidup (*standard of living*), yang diukur menggunakan pendapatan riil per kapita sebagai cerminan kesejahteraan suatu bangsa (Harmadi & Nugroho, 2020).

Konsep pembangunan manusia dalam kerangka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki kedudukan yang sepadan dengan pembangunan ekonomi, di mana keduanya dijadikan sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi tingkat kemajuan suatu negara. Hal ini sejalan dengan pendekatan *human capital* dalam teori pertumbuhan endogen, yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Dalam kerangka pertumbuhan endogen, faktor-faktor utama yang mendasari pertumbuhan mencakup kemampuan ilmu pengetahuan, potensi sumber daya alam, penguasaan teknologi, serta kekuatan kelembagaan (Romer,

1994). *Human capital* sangat erat kaitannya dengan tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk, sementara *physical capital* berperan sebagai pelengkap. Namun, di banyak negara berkembang, keberadaan modal fisik, akumulasi investasi, dan penguasaan teknologi masih tergolong rendah (Wiebe, 2012).

Seluruh bentuk belanja pemerintah yang diarahkan untuk memperkuat *human capital* idealnya mampu mendorong pemanfaatan berbagai potensi, seperti sumber daya alam (SDA), modal sosial (*social capital*), infrastruktur, institusi pendidikan tinggi, serta lembaga riset, dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, alokasi belanja negara di sektor kesehatan dan pendidikan telah terbukti memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Shen et al., 2021).

2.1.3 Belanja Pemerintah Daerah

Belanja Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, merupakan bagian dari rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dirumuskan melalui proses pembahasan dan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudian ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencakup perincian mengenai pendapatan serta pengeluaran daerah. Dalam konteks undang-undang tersebut, belanja daerah diartikan sebagai seluruh kewajiban finansial pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran yang berjalan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pengelompokan belanja daerah dibedakan menurut tiga klasifikasi utama, yaitu berdasarkan jenis, organisasi, dan fungsi. Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi bertujuan untuk menciptakan keterpaduan dan keselarasan dalam pengelolaan keuangan negara secara menyeluruh. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan sebagai landasan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, guna memastikan pemanfaatan sumber daya yang terbatas secara optimal dan berorientasi pada hasil yang maksimal.

Sebagai pelaksana pembangunan, pemerintah memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pondasi utama dalam proses pembangunan. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan berbagai langkah strategis guna meningkatkan kapasitas dan kemampuannya. Salah satu pendekatan yang dilakukan pemerintah adalah melalui alokasi pengeluaran atau investasi yang diarahkan pada pembangunan manusia.

Rostow dan Musgrave mengembangkan teori yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahapan pembangunan ekonomi, yang terdiri atas tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal, pemerintah membutuhkan persentase investasi yang besar untuk membangun infrastruktur dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Kemudian, pada tahap menengah, peran investasi pemerintah tetap diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hingga mencapai tahap tinggal landas, meskipun sektor swasta mulai memainkan peran yang lebih dominan. Di tahap lanjut, fokus pengeluaran pemerintah bergeser dari pembangunan infrastruktur

ke program sosial, seperti layanan kesehatan masyarakat dan jaminan hari tua (Mangkoesoebroto, 2008:145).

Musgrave (1991), ide utama dalam teori keuangan publik berkaitan dengan pembagian anggaran pemerintah ke dalam tiga fungsi: (1) alokasi, (2) distribusi, dan (3) stabilisasi. Keberhasilan atau kegagalan kebijakan pemerintah sangat bergantung pada kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah kurang efisien, maka akan terjadi pemborosan dalam penggunaan anggaran dan sumber daya produksi. Untuk menilai efektivitas kebijakan pemerintah, penilaian tersebut harus didasarkan pada dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah akan memengaruhi alokasi faktor-faktor produksi (Suparmoko, M, 2012).

2.1.4 Belanja Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.

Pendidikan adalah bentuk investasi yang dampaknya akan dirasakan di masa depan. Sebagai modal dasar, pendidikan memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu bangsa. Oleh karena itu,

pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan, yang digunakan untuk membangun fasilitas dan infrastruktur pendidikan serta untuk melakukan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia (*human capital*). Modal manusia merupakan investasi yang bernilai bagi individu, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan gagasan (Todaro & Smith, 2011). Komponen ini berperan penting dalam mendukung program pembangunan, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi yang mengandalkan skema manfaat yang menyebar (*benefit spillover*).

Secara umum, belanja pendidikan berperan sebagai sumber pembiayaan utama dalam mendukung pelaksanaan berbagai program dan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. Pengelolaan anggaran yang optimal di sektor ini diharapkan mampu mendorong peningkatan tingkat melek huruf serta memperpanjang rata-rata lama sekolah penduduk dewasa. Kedua indikator tersebut merupakan bagian penting dalam penguatan dimensi pendidikan, yang merupakan salah satu unsur utama dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.1.5 Belanja Pemerintah Daerah Sektor Kesehatan

Covey (1990) dalam Santoso (2013), kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan yang harus senantiasa dijaga dan ditingkatkan kualitasnya untuk menciptakan individu yang produktif. Untuk memastikan kualitas kesehatan masyarakat tetap terjaga, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran bagi berbagai kebutuhan di sektor kesehatan, seperti tenaga medis, obat-obatan, fasilitas puskesmas, dan rumah sakit. Kesehatan yang baik menjadi

fondasi utama dalam mendukung produktivitas kerja serta kemampuan belajar, baik pada tingkat individu maupun keluarga. (Dwiyana, dkk 2021)

Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk sektor kesehatan merupakan komponen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah bertujuan untuk memastikan hak warga negara untuk memperoleh layanan kesehatan yang memadai dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, sehingga dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berasal dari kalangan ekonomi rendah.

Kesehatan bukan hanya hak setiap warga negara, tetapi juga merupakan investasi yang penting bagi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang bersifat universal. Terdapat dua isu utama dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang memadai secara universal, yaitu bagaimana cara membiayai layanan kesehatan untuk masyarakat dan bagaimana mengalokasikan dana kesehatan secara efektif dan adil untuk menyediakan pelayanan yang merata bagi seluruh masyarakat (Bhisma Murti, 2010).

2.1.6 Belanja Pemerintah Daerah sektor Infrastruktur

Kodoatie (2003:24) mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial.

Menurut Friawan (2008), terdapat tiga alasan utama yang menjelaskan pentingnya infrastruktur dalam integrasi ekonomi. Pertama, infrastruktur yang baru berfungsi sebagai pendorong utama bagi pembangunan ekonomi. Kedua, untuk memaksimalkan manfaat dari integrasi, ketersediaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Ketiga, jaringan infrastruktur yang baik memainkan peran krusial dalam memperlancar aktivitas perdagangan dan investasi. Selain itu, perhatian terhadap perbaikan infrastruktur juga penting untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah.

Mourmouras dan Lee (1999) menyatakan bahwa peningkatan alokasi pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur memiliki kecenderungan positif dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, Todaro dan Smith (2011) menekankan bahwa sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara sinergis memiliki peranan penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Belanja Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Indeks Pembangunan Manusia

Para ahli ekonomi mengembangkan teori pembangunan yang didasari pada kapasitas produksi tenaga manusia di dalam proses pembangunan, yang kemudian dikenal dengan istilah investment *inhuman capital* (Schultz, 1961). Bahwa manusia merupakan suatu bentuk modal atau kapital sebagaimana bentuk-bentuk kapital lainnya, seperti mesin, teknologi, tanah, uang, dan material. Manusia sebagai *human capital* tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan

(ide), kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja. Tidak seperti bentuk kapital lain yang hanya diperlakukan sebagai alat saja, *human capital* ini dapat menginvestasikan dirinya sendiri melalui berbagai bentuk investasi, misalnya pendidikan formal/informal, pengalaman kerja, kesehatan, atau gizi, bahkan migrasi.

Alhumami (2004) menyatakan pendidikan bukan hanya melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta menguasai teknologi, melainkan juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut mendorong setiap warga negara untuk mandiri berwirausaha secara adil dan sehat. Kata lainnya, turut serta memberikan kontribusi aktif dalam pembangunan melalui produktivitasnya dapat meningkatkan pendapatan serta akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dari berbagai studi menunjukkan bahwa pendidikan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperluas peluang untuk meningkatkan kesehatan, pengetahuan, keterampilan, keahlian, serta wawasan individu. Hal ini memungkinkan mereka bekerja dengan lebih produktif, baik secara individu maupun dalam kelompok. Konsekuensinya, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin baik kualitas hidup seseorang. Dalam konteks perekonomian secara keseluruhan, semakin meningkat kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. (Nurfaida A, 2019)

United Nations Development Programme (UNDP) sejak tahun 1990-an dengan tegas menjelaskan betapa pentingnya pembangunan manusia, dimana

kualitas manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Disebutkan juga, bahwa tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati usia panjang, badan sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Laporan tersebut menjelaskan bahwa, pembangunan berpusat pada manusia dipromosikan melalui penegasan bahwa pembangunan manusia adalah tujuan akhir pembangunan (*the ultimate end*), sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah sarana (*the principal means*) untuk mencapai tujuan akhir pembangunan tersebut.

2.2.2 Hubungan Belanja Pemerintah Daerah Sektor Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Indeks Pembangunan Manusia

Kesehatan adalah aspek penting dan menjadi elemen dasar dalam kehidupan seseorang. Tanpa kondisi kesehatan yang optimal dan tubuh yang bugar, masyarakat tidak dapat mencapai tingkat produktivitas yang maksimal. Dalam kehidupan manusia, pembangunan di bidang kesehatan memiliki nilai yang sangat signifikan. Kesehatan ialah kebutuhan utama bagi setiap individu. Tanpa kesehatan yang baik, masyarakat tidak mampu memberikan kontribusi produktif bagi negara. Kelancaran aktivitas ekonomi suatu negara bergantung pada tersedianya jaminan kesehatan untuk seluruh penduduknya. (Wahid, 2012).

Menurut Undang-Undang di Indonesia, alokasi anggaran untuk kesehatan diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Pasal 171 ayat 2. Peraturan tersebut menetapkan bahwa anggaran kesehatan pemerintah pusat harus dialokasikan minimal 5% dari APBD di luar gaji. Sementara itu, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, diwajibkan mengalokasikan

minimal 10% dari APBD di luar gaji untuk sektor kesehatan. Salah satu komponen utama dalam sistem kesehatan nasional adalah pembiayaan kesehatan. Jika ditinjau dari definisi kesehatan yang dirumuskan oleh WHO, pembiayaan pembangunan perumahan dan pengadaan pangan juga berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Teori ekonomi menunjukkan bahwa kesehatan masyarakat yang baik berkontribusi pada produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Bloom et al. (2001), peningkatan kesehatan masyarakat dapat meningkatkan produktivitas individu, mengurangi absensi kerja, dan meningkatkan kapasitas kerja. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam kesehatan bukan hanya merupakan biaya, tetapi juga merupakan investasi yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi jangka panjang.

Dengan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, pemerintah dapat menurunkan angka kematian dan morbiditas, yang berkontribusi pada peningkatan harapan hidup dan kualitas sumber daya manusia. Cutler dan Lleras-Muney (2006) menunjukkan bahwa peningkatan kesehatan individu berhubungan positif dengan peningkatan pendapatan, karena individu yang lebih sehat cenderung memiliki produktivitas yang lebih tinggi dan lebih mampu berkontribusi pada perekonomian.

Dengan demikian, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi dalam kesehatan dapat menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan resilient, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

2.2.3 Hubungan Belanja Pemerintah Daerah Sektor Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Teori ekonomi klasik dan Keynesian sepakat bahwa infrastruktur yang baik, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi, dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dengan mengurangi biaya transaksi dan mempercepat pergerakan barang dan jasa. Menurut Aschauer (1989), investasi dalam infrastruktur publik dapat meningkatkan produktivitas sektor swasta, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Ia berargumen bahwa infrastruktur yang memadai tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi swasta.

Peran infrastruktur dalam pembangunan tercermin melalui kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi serta peningkatan taraf hidup masyarakat. Dari perspektif makroekonomi, keberadaan layanan infrastruktur turut memengaruhi produktivitas marginal dari modal swasta. Sementara itu, pada tingkat mikroekonomi, infrastruktur berperan dalam menekan biaya produksi. Di sisi lain, kontribusi infrastruktur terhadap kualitas hidup ditandai dengan terciptanya kenyamanan lingkungan fisik, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan konsumsi, produktivitas tenaga kerja, kemudahan akses terhadap lapangan pekerjaan, serta peningkatan kemakmuran riil. Infrastruktur juga mendukung stabilitas makroekonomi, antara lain melalui keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap dinamika pasar tenaga kerja (BAPPENAS, 2002).

2.3 Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris dilakukan untuk mencari bahan referensi dan sebagai pembandingan dari penelitian terdahulu, serta dengan tujuan untuk menunjukkan perbedaan atau menghindari asumsi tentang persamaan dengan penelitian sebelumnya. Maka dalam tinjauan empiris ini peneliti memasukkan hasil penelitian sebelumnya, diantaranya:

Sutarno et al., (2021) meneliti tentang Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh belanja daerah terhadap kualitas pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur dengan regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa belanja daerah memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap kualitas pembangunan manusia.

Sasongko & Wibowo (2022) meneliti *Government Spending and Regional Economic Growth: The Mediating Effect of Human Development Index*. Sampel data terdiri dari 459 kabupaten/kota di Indonesia selama periode 2016–2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung belanja pemerintah daerah (pendidikan, kesehatan, infrastruktur) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan pengaruh tidak langsung melalui Human Development Index (HDI) sebagai variabel mediasi. Metode yang digunakan adalah analisis data panel dengan *Fixed Effect Model* (FEM) dan uji Sobel untuk analisis mediasi (*trimming model*). Hasil penelitian menunjukkan *Health Spending* adalah satu-satunya variabel yang konsisten berpengaruh positif langsung dan tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. *Education Spending* justru

berdampak negatif terhadap HDI dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. *HDI* terbukti sebagai mediator penting dalam pengaruh *spending* terhadap GDRP.

Nurvita et al., (2022) melakukan penelitian berjudul *The Role of Public Spending on Education, Health, and Economic Growth toward Human Development Index in the Local Economy*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah di bidang Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah di bidang Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI) di Provinsi Jambi tahun 2012–2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan regresi data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, belanja pendidikan, dan belanja kesehatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap indeks pembangunan manusia. Implikasi model dalam penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi efektif dan optimal dalam mengalokasikan belanja pendidikan dan kesehatan untuk mendorong peningkatan modal manusia yang diukur dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi.

Tjodi et al., (2018) meneliti Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Studi di Provinsi Sulawesi Utara). Teknik analisis data menggunakan analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sub-struktur 1, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara pengeluaran di sektor

kesehatan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini memberikan wawasan penting tentang dampak kebijakan pengeluaran pemerintah dalam sektor-sektor tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Utara.

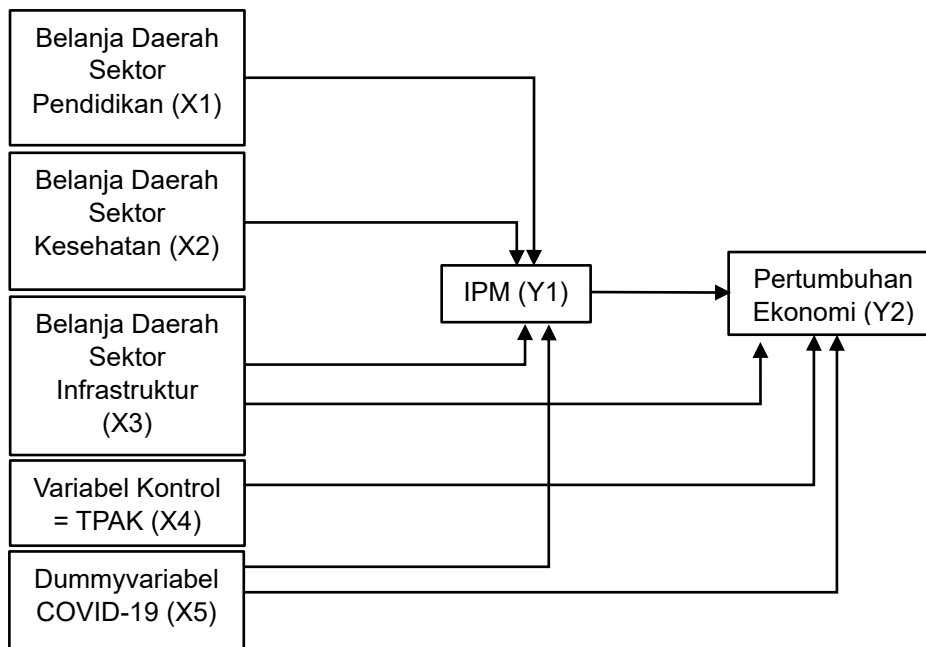
Christian Lendy Koyongian, Paulus Kindangen, George M.V.Kawung meneliti Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. Teknis analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda/Ordinary Least Square (OLS). Hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah, investasi, dan tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado.

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka penulis menyusun kerangka konseptual dengan variabel independen yaitu belanja pemerintah daerah sektor pendidikan (X1), belanja pemerintah daerah sektor kesehatan (X2), dan belanja pemerintah daerah sektor infrastruktur (X3), TPAK (X4) sebagai variabel kontrol dan Dummyvariabel COVID-19 (X5). Untuk variabel dependen yaitu indeks pembangunan manusia (Y1) pertumbuhan ekonomi (Y2) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Variabel ini merupakan variabel penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi referensi serta informasi baru mengenai pengaruh belanja pemerintah daerah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur

terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut kerangka konseptual dari penelitian ini.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka, studi terdahulu, dan kerangka konseptual maka rumusan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Belanja pemerintah daerah sektor pendidikan berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Belanja pemerintah daerah sektor kesehatan berpengaruh secara tidak

langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Belanja pemerintah daerah sektor infrastruktur berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.